



**PENGARUH IMPLEMENTASI *GREEN ACCOUNTING*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN *ENVIRONMENTAL DISCLOSURE*, TERHADAP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs)**

**Jumadi<sup>1</sup>, Helmi Herawati<sup>2</sup>, Nina Yulianasari<sup>3</sup>**

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu<sup>1,2,3</sup>

[jumadigg7@gmail.com](mailto:jumadigg7@gmail.com)<sup>1</sup>, [helmiherawati77@gmail.com](mailto:helmiherawati77@gmail.com)<sup>2</sup>, [ninayulianasari26@gmail.com](mailto:ninayulianasari26@gmail.com)<sup>3</sup>

**INFORMASI ARTIKEL**

Diterima : 14/05/2026  
Direvisi : 25/05/2026  
Disetujui : 29/05/2026

**Keywords:**

*Green Accounting, Good Corporate Governance (Gcg), Environmental Disclosure, Sustainable Development Goals (Sdgs), Mining Companies.*

**Kata Kunci:**

*Green Accounting, Kepemilikan Institusional, Environmental Disclosure, Sustainable Development Goals (Sdgs), Perusahaan Pertambangan.*

**ABSTRACT:**

*This study aims to examine the effect of Green Accounting Implementation, Institutional Ownership, and Environmental Disclosure on Sustainable Development Goals (SDGs) in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2020–2024. The population of this study consists of 63 mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2020–2024. Data collection was conducted using purposive sampling, resulting in a sample of 8 companies. The data used are secondary data obtained from Annual Reports and Sustainability Reports published through the official website of the Indonesia Stock Exchange (IDX) at [www.idx.com](http://www.idx.com) and the official websites of each company. The analytical method used in this research is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that Green Accounting implementation (X1) and Environmental Disclosure (X3) have no effect on Sustainable Development Goals (SDGs). Meanwhile, Institutional Ownership (X2) has a significant negative effect on Sustainable Development Goals (SDGs). The results of this study also show that Green Accounting implementation (X1), Institutional Ownership (X2), and Environmental Disclosure (X3) simultaneously have a significant effect on Sustainable Development Goals (SDGs).*

**ABSTRAK:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Implementasi *Green Accounting*, Kepemilikan Institusional, dan *Environmental Disclosure* terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2024. Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2024 sebanyak 63 perusahaan, pengumpulan data dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan sampel yang diperoleh berjumlah 8 perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari *Annual Report* dan *Sustainability Report* yang dipublikasikan melalui *website* resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI) di [www.idx.com](http://www.idx.com) dan *website* resmi masing-masing perusahaan. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi *Green Accounting* (X<sub>1</sub>) dan *Environmental Disclosure* (X<sub>3</sub>) tidak berpengaruh terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sementara itu, Kepemilikan



Institusional ( $X_2$ ) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hasil dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa Implementasi *Green Accounting* ( $X_1$ ), Kepemilikan Institusional ( $X_2$ ), dan *Environmental Disclosure* ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs).

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, isu pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian utama di tingkat global, terutama terkait dengan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri. PBB, melalui Agenda 2030, menetapkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai kerangka kerja internasional untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan (United Nations, 2015). Berdasarkan *Sustainable Development Report 2023*, Indonesia menduduki peringkat ke-75 dengan skor pencapaian *sustainable development goals* (SDGs) sebesar 70,2%. Meskipun ada peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama pada pilar lingkungan (PPN/Bappenas, 2023). Beberapa area yang masih menunjukkan hasil buruk termasuk masalah kelaparan, kesehatan, keberlanjutan kota, pelestarian ekosistem, dan penguatan kelembagaan, yang mengindikasikan perlunya upaya yang lebih intensif dari berbagai sektor, termasuk dunia usaha.

Sektor pertambangan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun juga menjadi sektor yang sangat rentan terhadap dampak negatif lingkungan. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada tahun 2022, sektor pertambangan menyumbang sekitar 14,1% terhadap PDB Indonesia dengan nilai ekspor mencapai USD 62,8 miliar (Kementerian ESDM, 2023). Namun, dampak buruk dari sektor ini juga tidak bisa diabaikan, seperti deforestasi yang mencakup lebih dari 3,2 juta hektar, pencemaran air dan tanah akibat tailing dan limbah B3, serta konflik sosial dengan masyarakat sekitar (Walhi, 2022). Berbagai kasus pencemaran, seperti yang terjadi pada PT Freeport Indonesia di Papua, pencemaran air raksa di Kalimantan, serta tumpahan minyak oleh perusahaan migas, menunjukkan bahwa praktik bisnis di sektor ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan (Tempo.co, 2023). Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara pencapaian target ekonomi dan tanggung jawab perusahaan terhadap aspek lingkungan dan sosial.

Untuk mendorong perusahaan agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (OJK, 2017). Regulasi ini mengharuskan perusahaan untuk menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, tingkat kepatuhan terhadap regulasi ini masih bervariasi di antara perusahaan. Data OJK menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, sekitar 94% dari 882 emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mempublikasikan laporan keberlanjutan (OJK, 2024). Di sektor



pertambangan, meskipun sebagian besar perusahaan besar telah mempublikasikan laporan keberlanjutan, masih terdapat ketidaksesuaian dalam pengungkapan informasi lingkungan dan standar pelaporan yang digunakan, serta kurangnya integrasi antara strategi bisnis dan pencapaian *sustainable development goals* (SDGs) (Dosinta et al., 2024).

Salah satu pendekatan yang dapat membantu perusahaan dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah penerapan *Green Accounting*. *Green accounting* adalah sistem akuntansi yang memadukan biaya lingkungan dalam laporan keuangan perusahaan, yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola dampak lingkungan dari aktivitas operasional perusahaan (Loen, 2018). Dengan menerapkan *green accounting*, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko lingkungan, dan meningkatkan citra perusahaan di mata *stakeholder* (Endiana et al., 2020). Transparansi dalam pelaporan biaya konservasi, pengelolaan limbah, serta investasi pada teknologi ramah lingkungan memberikan sinyal positif kepada investor dan masyarakat mengenai komitmen keberlanjutan perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan *green accounting* memiliki pengaruh positif terhadap pencapaian *sustainable development goals* (SDGs), karena membantu perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan mengurangi eksternalitas negatif (Selpiyanti & Fakhroni, 2020).

Selain *green accounting*, prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) juga memainkan peran penting dalam pencapaian SDGs. Dalam penelitian ini, *good corporate governance* (GCG) di proksikan pada kepemilikan institusional, yang merujuk pada proporsi saham yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, dan lembaga serta perusahaan lainnya. Kepemilikan institusional diyakini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan, karena investor institusional memiliki kepentingan jangka panjang dan lebih proaktif dalam memastikan perusahaan menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan (Achim et al., 2023). Penelitian Nurrahman & Sudarno (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Faktor lain yang penting adalah *Environmental Disclosure* (ED), yang merujuk pada pengungkapan informasi mengenai kinerja dan dampak lingkungan perusahaan dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan. Pengungkapan lingkungan ini berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan terhadap *stakeholder*, terutama dalam industri dengan dampak lingkungan yang besar seperti pertambangan (Setiadi & Sutadipraja, 2022). Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan perlu mengungkapkan informasi lingkungan untuk memperoleh legitimasi sosial dan menjaga kepercayaan publik (Dowling & Pfeffer dalam Ghozali, 2020). Pengungkapan yang transparan dan lengkap mengenai kebijakan lingkungan, penggunaan sumber daya, emisi, limbah, dan program konservasi dapat meningkatkan citra perusahaan dan memperkuat posisinya dalam mencapai *sustainable development goals* (SDGs) (Nabila & Arinta, 2021). Meski demikian, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang bervariasi terkait pengaruh *environmental disclosure* terhadap *sustainable development goals* (SDGs). Penelitian Setiadi & Sutadipraja (2022) menemukan pengaruh positif, sementara studi lain menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan perusahaan masih dalam bentuk simbolis dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam strategi keberlanjutan (Arum, 2023; Loen, 2018).



Sudah banyak studi yang membahas hubungan antara *green accounting*, *good corporate governance*, dan *environmental disclosure* dengan *sustainable development goals*. Tapi, masih ada beberapa celah yang belum terisi. Pertama, kebanyakan penelitian terdahulu menyoroti sektor manufaktur atau perusahaan secara umum (Arum, 2023; Loen, 2018; Nabila & Arinta, 2021; Somantri & Sudrajat, 2023). Padahal, sektor pertambangan punya karakteristik unik dan dampak lingkungan yang jauh lebih besar, tapi tetap saja sering luput dari perhatian khusus. Kedua, hasil riset soal pengaruh *green accounting* dan *environmental disclosure* terhadap *sustainable development goals* (SDGs) juga belum konsisten. Ada beberapa studi menyatakan berpengaruh positif (Loen, 2018; Selpiyanti & Fakhroni, 2020; Somantri & Sudrajat, 2023), namun ada yang menyatakan tidak ada pengaruh signifikan (Arum, 2023; Hindriani et al., 2024), bahkan ada yang menyatakan berpengaruh negatif (Rachmawati & Karim, 2021). Ketiga, variabel kepemilikan institusional sebagai proksi *good corporate governance* (GCG) juga hampir tidak pernah diuji secara spesifik di konteks pencapaian *sustainable development goals* (SDGs) di sektor pertambangan Indonesia.

## TINJAUAN LITERATUR

### *Stakeholder Theory*

Tahun 1984 Freeman dalam Ghozali (2020) memperkenalkan Teori Pemangku Kepentingan, yang menekankan pentingnya manajer memahami perusahaan bukan hanya sebagai entitas yang berfokus pada keuntungan internal, tetapi sebagai bagian dari jaringan hubungan dengan berbagai pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh aktivitas bisnis. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan seharusnya memberikan manfaat tidak hanya bagi pemegang saham, tetapi juga bagi kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain yang memiliki kepentingan. Keberhasilan dan kelangsungan perusahaan sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan ini (Ghozali, 2020). Melalui perspektif pemangku kepentingan, hubungan antara bisnis dan kelompok atau individu yang terkait dapat dianalisis untuk memungkinkan pengelolaan yang lebih efektif. Dengan kata lain, bisnis dipahami sebagai jaringan interaksi antar kelompok yang memiliki kepentingan dalam kegiatan perusahaan (Freeman dalam Ghozali, 2020). Selain itu, menurut deegan pemangku kepentingan memiliki kapasitas untuk menengaruhi penggunaan sumber daya ekonomi perusahaan. Besarnya pengaruh ini tergantung pada kekuatan mereka atas sumber daya tersebut, baik dalam membatasi penggunaan modal dan tenaga kerja, mengakses media yang berpengaruh, mengatur perusahaan, maupun memengaruhi konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan (Ghozali, 2020).

### *Legitimacy Theory*

Teori Legitimasi menekankan bahwa organisasi selalu berusaha agar aktivitasnya dipandang sah oleh masyarakat di sekitarnya, sesuai dengan norma dan batasan sosial yang berlaku. Norma ini tidak statis, melainkan berubah seiring waktu, sehingga perusahaan harus responsif terhadap dinamika lingkungan etika dan moral tempat mereka beroperasi (Ghozali, 2020). Teori ini kerap dikaitkan dengan akuntansi lingkungan dan digunakan sebagai dasar dalam pengembangan konsep pengungkapan tanggung jawab sosial (Badjuri et al., 2021). Perusahaan semakin menyadari ketergantungannya pada masyarakat dan lingkungan tempat mereka beroperasi, yang dapat memengaruhi keberlanjutan usaha dalam jangka panjang (Mulyani et al., 2017). Menurut Braam, teori legitimasi menggambarkan adanya kontrak



sosial antara perusahaan dengan masyarakat di wilayah operasinya (Mumtazah & Purwanto, 2020). Legitimasi yang dimiliki suatu perusahaan dapat menjadi pertimbangan penting bagi para *stakeholder* dalam mengambil keputusan investasi (Supadi & Sudana, 2018). Hal ini disebabkan karena legitimasi mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan.

Teori legitimasi sangat berkaitan dengan praktik pengungkapan informasi lingkungan dan sosial sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik mengenai dampak positif maupun negatif dari aktivitas operasional (Putri et al., 2022). Menurut Brown dan Deegan dalam Widiastuti *et al* (2018) menjelaskan lebih rinci mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta menyatakan bahwa kontrak sosial menuntut perusahaan untuk menjalankan berbagai aktivitas sosial dalam setiap aspek kinerja. Teori legitimasi juga menekankan pentingnya analisis terhadap perilaku perusahaan dalam konteks lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial, yang mencakup norma, nilai sosial, serta respons masyarakat terhadap kegiatan operasional perusahaan (Widyaningsih, 2020). Keberlanjutan serta pertumbuhan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kontribusi output yang diberikan kepada masyarakat.

### ***Sustainable Development Goals (SDGs)***

*Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan kerangka pembangunan global yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan negosiasi pembangunan oleh seluruh negara di dunia (Wahyuningsih, 2018). Agenda pembangunan berkelanjutan ini ditetapkan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-70 pada September 2015 dan menjadi kelanjutan dari *Millenium Development Goals (MDGs)*, yakni program sebelumnya yang berhasil dengan delapan target utamanya. Cakupan *Sustainable Development Goals (SDGs)* jauh lebih luas dibandingkan MDGs karena mencakup isu prioritas pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, gizi, serta aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, *Sustainable Development Goals (SDGs)* juga diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Pada hakikatnya, *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan agenda pembangunan global yang dirumuskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial, ekonomi, lingkungan hidup, hukum, dan tata kelola secara berkesinambungan guna menjamin kualitas hidup manusia dalam jangka panjang (Wicaksono, 2023). Tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut menjadi pedoman bagi negara-negara di dunia untuk mengatasi tantangan global, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ekonomi, penguatan inklusi sosial, pelestarian lingkungan, serta penguatan perdamaian dan tata kelola yang baik hingga tahun 2030 (Ramadhani & Prihantoro, 2020).

Indonesia termasuk negara yang mengadopsi SDGs dan berkewajiban melaksanakan berbagai kebijakan dan program untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan. Melalui Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, pemerintah mengintegrasikan empat tujuan dan sejumlah indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015–2019). Dari 169 target SDGs, sekitar 57 persen atau 96 target telah sesuai dengan arah pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SDGs di Indonesia dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah juga membentuk Sekretariat Nasional SDGs yang memiliki mandat untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan implementasi SDGs di tingkat nasional. SDGs dirancang melalui 17



tujuan utama yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, SDGs mencakup 17 tujuan dan 169 target yang ditargetkan tercapai dalam kurun waktu 2016 hingga 2030 (Bebbington & Unerman, 2018).

### **Green Accounting**

*Green Accounting* dipandang sebagai pendekatan baru dalam praktik akuntansi yang tidak hanya menitik beratkan pada transaksi keuangan, tetapi juga memasukkan aspek lingkungan dan sosial. Mengacu pada konsep tiga pilar dasar yang dikemukakan oleh Elkington dalam Lako (2018), akuntansi hijau terdiri dari tiga komponen utama. Pilar pertama adalah akuntansi lingkungan, yakni proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, peringkasan, serta pelaporan atas berbagai aktivitas terkait lingkungan untuk menghasilkan informasi lingkungan yang andal. Pilar kedua ialah akuntansi sosial, yaitu proses akuntansi yang berfokus pada pengakuan, pengukuran, pencatatan, peringkasan, dan pelaporan informasi mengenai aktivitas sosial perusahaan. Pilar ketiga adalah akuntansi keuangan yang mencakup proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas (Lako, 2018). Dengan demikian, ketiga pilar tersebut menunjukkan bahwa *Green Accounting* mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan keuangan yang saling berhubungan. Secara keseluruhan, *green accounting* dapat dipahami sebagai proses untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, merangkum, melaporkan, dan mengungkapkan informasi mengenai aktivitas keuangan, sosial, dan lingkungan sebagai bentuk akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan serta sebagai dasar pengambilan keputusan (Lako, 2018).

### **Good Corporate Governance (GCG)**

*Good corporate governance* adalah suatu sistem aturan yang mengarahkan elemen-elemen dalam perusahaan untuk bekerja sama demi mencapai tujuan perusahaan (Juliani *et al.*, 2023). Penerapan *good corporate governance* diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, penerapan *good corporate governance* juga bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Ivana & Novianti, 2022). *Good corporate governance* merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi pasar yang berhubungan erat dengan tingkat kepercayaan terhadap perusahaan yang mengimplementasikannya. Di Indonesia, penerapan *good corporate governance* sangat krusial bagi dunia usaha karena dianggap dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Selain itu, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik juga mendorong terwujudnya persaingan yang sehat dan membantu pemerintah dalam mengadopsi standar tata kelola perusahaan di Indonesia (Meirawati *et al.*, 2023). Mekanisme *good corporate governance* dalam penelitian ini diprosikan pada kepemilikan institusional.

### **Environmental Disclosure**

*Environmental disclosure* menggambarkan penyajian berbagai informasi terkait kinerja dan tanggung jawab lingkungan yang dicantumkan perusahaan dalam laporan tahunannya. Secara umum, bentuk pengungkapan tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu *voluntary disclosure* dan *mandatory disclosure* (Setiadi & Agustina, 2020). *Voluntary disclosure* mencakup informasi yang disampaikan perusahaan atas inisiatif sendiri karena dianggap relevan dengan kegiatan operasionalnya. Sementara itu, *mandatory disclosure*



merupakan informasi yang wajib disajikan karena telah ditetapkan dalam ketentuan atau regulasi yang berlaku (Zada & Sari, 2024).

Keberadaan pengungkapan lingkungan dalam laporan tahunan memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan investor, untuk menilai bagaimana perusahaan menjalankan aktivitas operasionalnya, khususnya terkait dampak lingkungan. Penyampaian informasi yang lebih luas juga berpotensi memperkuat citra positif perusahaan. Semakin lengkap dan berkualitas pengungkapan keberlanjutan yang disajikan, semakin besar kemungkinan perusahaan memperoleh tanggapan positif dari para *stakeholder*, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kinerja keuangan (Haninun et al., 2018). Pengungkapan lingkungan dapat diukur melalui metode pemberian skor pada setiap item pengungkapan yang terdapat dalam laporan keuangan, yang dikenal dengan istilah *disclosure-scoring*. Skor diberikan dengan nilai 1 jika item tersebut diungkapkan, dan 0 jika tidak diungkapkan (Handayani dalam Rahmawati, 2021:33). Pengukuran ini dapat dilakukan dengan menggunakan *checklist* yang memuat item-item pengungkapan yang tercantum dalam *Global Reporting Initiative* (GRI) 2016 (GRI-201), yang kemudian dicocokkan dengan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Daftar indeks GRI (201) yang digunakan dalam mengukur pengungkapan lingkungan ini adalah 30 topik item lingkungan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa *annual report* dan *sustainability report* perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024 yang diperoleh melalui website resmi BEI dan website masing-masing perusahaan. Populasi penelitian berjumlah 63 perusahaan pertambangan, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 8 perusahaan sebagai sampel penelitian dengan total 40 data observasi.

Data penelitian merupakan gabungan data cross section dan time series yang diperlakukan sebagai pooled data. Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara agregat pada perusahaan pertambangan periode 2020–2024.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.  
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Green Accounting</i>	40	.00	3.00	.1746	.48432
Kepemilikan Institusional	40	.26	.93	.6472	.13993
<i>Environmental Disclosure</i>	40	.17	.80	.5467	.15991



SDGs	40	.35	1.00	.7618	.20635
Valid N (listwise)	40				

Sumber : Hasil Output SPSS 2026

Dari hasil uji analisis statistik deskriptif tabel IV. 1 diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini :

1. Variabel *Green Accounting* ( $X_1$ ) memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 3,00 dengan nilai rata-rata sebesar 0,1746 serta standar deviasi sebesar 0,48432. Nilai rata-rata yang relatif rendah menunjukkan bahwa penerapan *Green Accounting* pada perusahaan masih tergolong minim. Selain itu, nilai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan nilai rata-rata mengindikasikan adanya variasi yang cukup tinggi antar perusahaan dalam menerapkan praktik *Green Accounting*.
2. Variabel Kepemilikan Institusional ( $X_2$ ) memiliki nilai minimum sebesar 0,26 dan nilai maksimum sebesar 0,93 dengan nilai rata-rata sebesar 0,6472 dan standar deviasi sebesar 0,13993. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar saham perusahaan dimiliki oleh institusi, sehingga struktur kepemilikan cenderung didominasi oleh investor institusional. Rendahnya standar deviasi mengindikasikan bahwa proporsi kepemilikan institusional relatif stabil antar perusahaan.
3. Variabel *Environmental Disclosure* memiliki nilai minimum sebesar 0,17 dan nilai maksimum sebesar 0,80 dengan nilai rata-rata sebesar 0,5467 serta standar deviasi sebesar 0,15991. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan lingkungan perusahaan berada pada kategori sedang. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa perusahaan telah mulai mengungkapkan informasi lingkungan, namun belum sepenuhnya optimal, sejalan dengan upaya perusahaan dalam memperoleh legitimasi dari para pemangku kepentingan.
4. Variabel *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki nilai minimum sebesar 0,35 dan nilai maksimum sebesar 1,00 dengan nilai rata-rata sebesar 0,7618 serta nilai standar deviasi sebesar 0,20635. Nilai rata-rata yang relatif tinggi menunjukkan bahwa perusahaan secara umum telah mengintegrasikan dan mengungkapkan aspek SDGs dalam aktivitas operasional dan pelaporan. Meskipun demikian, perbedaan nilai antar perusahaan masih terlihat, yang menunjukkan adanya variasi tingkat komitmen perusahaan terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.17220060
Most Extreme Differences	Absolute	.122
	Positive	.074
	Negative	-.122
Test Statistic		.122



Asymp. Sig. (2-tailed)	.134 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	
c. Lilliefors Significance Correction.	

Sumber : Hasil Output SPSS 2026

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel IV. 2, dapat dilihat bahwa kriteria pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05, maka data residual dianggap berdistribusi normal. Dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov diatas, diperoleh nilai Asymp. Sig. sebesar 0,134, yang mana lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal dan telah memenuhi asumsi normalitas.

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	<i>Green Accounting</i>	.951	1.051
	Kepemilikan Institusional	.999	1.001
	<i>Environmental Disclosure</i>	.952	1.050

a. Dependent Variable: SDGs

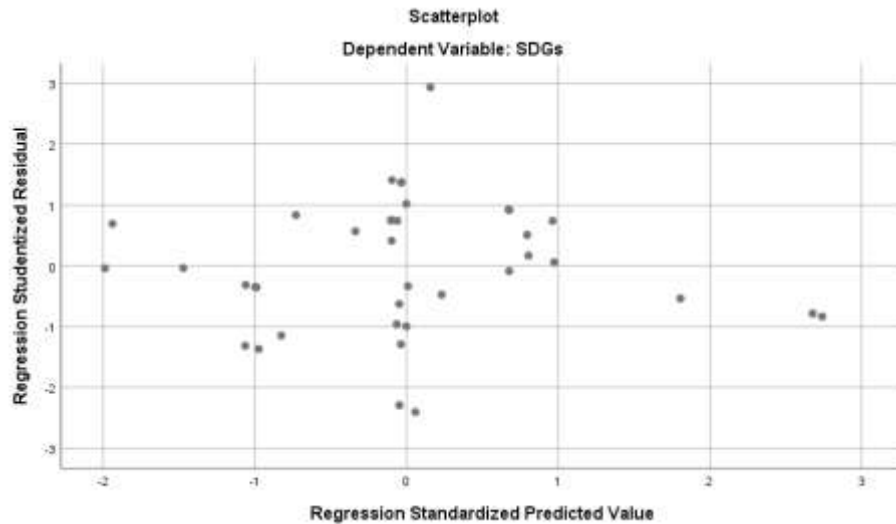
Sumber : Hasil Output SPSS 2026

Berdasarkan uji multikolinearitas pada tabel IV.3 diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel *Green Accounting* memiliki nilai tolerance sebesar 0,951 dan nilai VIF sebesar 1,051, maka dapat di simpulkan bahwa tidak terdapatnya multikolinearitas pada variabel *Green Accounting*.
2. Variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai tolerance sebesar 0,999 dan nilai VIF sebesar 1,001, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapatnya multikolinearitas pada variabel Kepemilikan Intutisional
3. Variabel *Environmental Disclosure* memiliki nilai tolerance sebesar 0,952 dan nilai VIF sebesar 1,050, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya multikolinearitas pada variabel *Environmental Disclosure*.



**Gambar 1. Hasil Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : Hasil Output SPSS 2026

Berdasarkan hasil output diagram diatas diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas. Titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

**TABEL 4.**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.294	.168		7.707	.000
	<i>Green Accounting</i>	.006	.061	.015	.106	.916
	Kepemilikan Institusional	-.811	.205	-.550	-3.955	.000
	<i>Environmental Disclosure</i>	-.015	.184	-.012	-.081	.936

a. Dependent Variable: SDGs

Sumber : Hasil Output SPSS 2026

Berdasarkan hasil analisis data diatas maka di dapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 1,294 + 0,006X_1 - 0,811X_2 - 0,015X_3 + e$$

Keterangan dari persamaan diatas :

1. Konstanta ( $\alpha$ )

Nilai konstanta sebesar 1,294 menunjukkan bahwa apabila *Green Accounting*, Kepemilikan Institusional, dan *Environmental Disclosure* dianggap konstan atau bernilai nol , maka nilai



SDGs sebesar 1,294.

2. *Green Accounting* (X1)

Nilai koefisien regresi *Green Accounting* bertanda positif sejumlah 0,006, mempunyai arti apabila *Green Accounting* bertambah satu satuan, maka *Sustainable Development Goals* (SDGs) akan bertambah sejumlah 0,006.

3. Kepemilikan Institusional (X2)

Nilai koefisien regresi Kepemilikan Institusional sebesar -0,811 bernilai negatif, mempunyai arti bahwasanya setiap terjadi peningkatan pada variabel Kepemilikan Institusional sebesar satu satuan, maka *Sustainable Development Goals* (SDGs) turun sebesar -0,811.

4. *Environmental Disclosure* (X3)

Nilai koefisien regresi *Environmental Disclosure* sebesar -0,015 bernilai negatif, mempunyai arti bahwasanya setiap peningkatan pada variabel *Environmental Disclosure* sebesar satu satuan, maka *Sustainable Development Goals* (SDGs) turun sebesar -0,015.

Tabel 5. Hasil Uji t

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.294	.168		7.707	.000
	<i>Green Accounting</i>	.006	.061	.015	.106	.916
	Kepemilikan Institusional	-.811	.205	-.550	-3.955	.000
	<i>Environmental Disclosure</i>	-.015	.184	-.012	-.081	.936

a. Dependent Variable: SDGs

Sumber : Hasil Output SPSS 2026

Tabel 5 hasil dari pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji t pada tabel IV.5 , variable *Green Accounting* memiliki nilai t hitung sebesar 0,106 dengan nilai signifikansi sebesar 0,916. Nilai tersebut menunjukkan bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel ( $0,106 < 1,688$ ) serta nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa *Green Accounting* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dengan demikian, implementasi *Green Accounting* pada perusahaan pertambangan yang menjadi objek penelitian belum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi *Green Accounting* tidak berpengaruh terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau hipotesis 1 ( $H_1$ )
2. Berdasarkan uji t pada tabel IV.5 bahwa variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai t hitung sebesar -3,955 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai absolut t hitung lebih besar dari t tabel ( $3,955 > 1,688$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs). Koefisien regresi bernilai negatif mengindikasikan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional, maka tingkat pencapaian SDGs cenderung menurun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan



Institusional berpengaruh terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau hipotesis 2 (H<sub>2</sub>).

3. Berdasarkan uji t pada tabel IV.5 variabel *Environmental Disclosure* memiliki nilai t hitung sebesar -0,081 dengan nilai signifikansi sebesar 0,936. Nilai t hitung lebih kecil dari tabel (0,081 < 1,688) serta nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa *Environmental Disclosure* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs). Artinya, pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan belum secara langsung berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Environmental Disclosure* tidak berpengaruh terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau hipotesis 3 (H<sub>3</sub>).

**Tabel 6.**  
**Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.504	3	.168	5.231	.004 <sup>b</sup>
	Residual	1.156	36	.032		
	Total	1.661	39			

Sumber : Hasil Output SPSS 2026

Berdasarkan hasil uji F pada tabel diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,004, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis 4 (H<sub>4</sub>) diterima, yang berarti bahwa model regresi signifikan secara simultan. Artinya, variabel implementasi *green accounting*, kepemilikan institusional, dan *environmental disclosure* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *sustainable development goals* (SDGs).

**Tabel 7.**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.551 <sup>a</sup>	.304	.246	.17923

Bedasarkan hasil uji koefisien dterminasi (R<sup>2</sup>) pada tabel IV.7, nilai *adjusted R Square* menunjukkan nilai sebesar 0,246 atau 24,6%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan vatiabel independen yaitu implementasi *Green Accounting*, Kepemilikan Intitusional, dan *Environmental Disclosure* dapat menjelaskan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebesar 24,6%, sisanya sebesar 75,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

### **Pengaruh Implementasi *Green Accounting* terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs)**

Berdasarkan hasil uji regresi, variabel Implementasi *Green Accounting* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.006, nilai t hitung sebesar 0,106 dengan tingkat signifikansi 0,916



$> 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa Implementasi *Green Accounting* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs), sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh Implementasi *Green Accounting* terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) ditolak. Secara empiris, temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan *Green Accounting* oleh perusahaan belum mampu mendorong pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) secara nyata. Meskipun *Green Accounting* bertujuan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam sistem akuntansi perusahaan, implementasi masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam strategis bisnis perusahaan.

Ditinjau dari *stakeholder theory*, perusahaan seharusnya memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lingkungan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Green Accounting* belum dianggap sebagai faktor yang memberikan nilai tambah langsung bagi *stakeholder* dalam konteks pencapaian SDGs. Selain itu, berdasarkan *legitimacy theory*, pengungkapan dan penerapan praktik lingkungan dilakukan untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat. Tidak signifikannya pengaruh *Green Accounting* mengindikasikan bahwa praktik tersebut belum mampu meningkatkan legitimasi perusahaan secara substansial dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian (Arum, 2023), menunjukkan bahwa implementasi *Green Accounting* berpengaruh positif terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini menolak  $H_1$ , yang berarti Implementasi *Green Accounting* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs).

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Sustainable Development Goals (SDGs)**

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional memiliki koefisien regresi sebesar  $-0,811$ , nilai  $t$  hitung sebesar  $-3,955$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs), sehingga hipotesis penelitian diterima. Pengaruh negatif ini mengindikasikan bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh institusi, maka pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) cenderung mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investor institusional lebih berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial jangka pendek dibandingkan dengan komitmen terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada konteks perusahaan pertambangan, kepemilikan institusional yang tinggi cenderung mendorong manajemen perusahaan untuk meningkatkan eksploitasi sumber daya alam guna memperoleh laba, dividen, dan kenaikan harga saham dalam waktu yang relatif cepat. Tekanan dari investor institusional tersebut menyebabkan perusahaan lebih fokus pada peningkatan produksi dan keuntungan ekonomi dibandingkan pada pengelolaan lingkungan serta tanggung jawab sosial perusahaan. Akibatnya, aktivitas operasional perusahaan pertambangan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, dan berkurangnya perhatian terhadap aspek keberlanjutan yang menjadi tujuan utama SDGs.

Dalam perspektif *stakeholder theory*, institusi sebagai pemegang saham mayoritas memiliki kekuatan yang besar dalam menentukan arah kebijakan perusahaan. Namun, dominasi kepentingan ekonomi investor institusional dapat menyebabkan perusahaan lebih mengutamakan kepentingan pemegang saham dibandingkan kepentingan stakeholder lainnya, seperti masyarakat dan lingkungan. Kondisi ini menyebabkan perusahaan kurang optimal



dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada sektor pertambangan yang memiliki dampak lingkungan cukup besar. Ditinjau dari *legitimacy theory*, perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi seharusnya memiliki dorongan lebih besar untuk menjaga legitimasi melalui penerapan praktik bisnis berkelanjutan. Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi perusahaan lebih diarahkan pada upaya memenuhi ekspektasi investor dan mempertahankan profitabilitas perusahaan dibandingkan legitimasi sosial dan lingkungan. Dengan demikian, perusahaan cenderung mengabaikan program-program keberlanjutan yang mendukung pencapaian SDGs apabila dianggap dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Maharani & Prastiwi (2024) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Sustainable Development*. Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini menolak H<sub>2</sub>, yang berarti Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs).

### **Pengaruh Environmental Disclosure terhadap Sustainable Development Goals (SDGs).**

Berdasarkan hasil uji regresi, variabel *Environmental Disclosure* memiliki koefisien regresi sebesar -0,015, nilai t hitung sebesar -0,081 dengan nilai signifikansi  $0,936 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa *Environmental Disclosure* tidak berpengaruh signifikan terhadap SDGs, sehingga hipotesis penelitian ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan belum mampu mendorong pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pengungkapan lingkungan cenderung bersifat formalitas dan belum mencerminkan implementasi nyata praktik berkelanjutan dalam operasional perusahaan.

Berdasarkan *legitimacy theory*, *environmental disclosure* digunakan perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan tersebut belum cukup kuat untuk meningkatkan persepsi legitimasi perusahaan dalam konteks SDGs, kemungkinan karena informasi yang disajikan bersifat umum dan kurang mendalam. Selain itu, dalam kerangka *stakeholder theory*, *environmental disclosure* seharusnya menjadi alat komunikasi antara perusahaan dan *stakeholder* terkait komitmen lingkungan. Tidak signifikannya pengaruh variabel ini menunjukkan bahwa *stakeholder* belum menjadi pengungkapan lingkungan sebagai dasar utama dalam menilai kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Setiadi & Sutadipraja (2022) menunjukkan bahwa *environmental disclosure* berpengaruh positif terhadap pencapaian *sustainable development goals* (SDGs). Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini menolak H<sub>3</sub>, yang berarti *Environmental Disclosure* tidak berpengaruh signifikan terhadap *sustainable development goals* (SDGs).

### **Pengaruh Implementasi Green Accounting, Kepemilikan Intitusional, Dan Environmental Disclosure Terhadap Sustainable Deveploment Goals (Sdgs).**

Berdasarkan hasil pengujian Uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 5,231 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004, yang berada di bawah ambang batas signifikansi 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa variabel *Green Accounting*, Kepemilikan Institusional, dan *Environmental Disclosure* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa seluruh variabel independen secara simultan memengaruhi SDGs dapat diterima. Hasil pengujian



simultan tersebut mengindikasikan bahwa pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) tidak dapat dijelaskan secara parsial oleh satu faktor tertentu, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai aspek yang saling terkait. Implementasi praktik akuntansi lingkungan, mekanisme tata kelola perusahaan melalui kepemilikan institusional, serta pengungkapan informasi lingkungan secara kolektif membentuk kerangka yang mendukung keberlanjutan perusahaan. Meskipun secara individual *Green Accounting* dan *Environmental Disclosure* belum menunjukkan pengaruh yang signifikan, keberadaan kedua variabel tersebut tetap memberikan kontribusi dalam memperkuat kemampuan model penelitian ketika diuji secara simultan dengan Kepemilikan Institusional.

Ditinjau dari perspektif *Stakeholder Theory*, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai pemangku kepentingan lainnya, seperti masyarakat dan lingkungan. Kepemilikan Institusional merepresentasikan kepentingan investor sebagai *stakeholder* utama yang memiliki kekuatan dalam mendorong kebijakan perusahaan, sementara *Green Accounting* dan *Environmental Disclosure* mencerminkan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap *stakeholder* non-finansial. Secara simultan, ketiga variabel tersebut menggambarkan upaya perusahaan dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, berdasarkan *Legitimacy Theory*, pengaruh simultan variabel independen terhadap SDGs menunjukkan adanya upaya perusahaan untuk memperoleh serta mempertahankan legitimasi dari masyarakat. Kombinasi antara kebijakan tata kelola perusahaan dan praktik pengungkapan lingkungan menjadi sarana bagi perusahaan dalam menunjukkan kepatuhan terhadap norma dan ekspektasi sosial. Walaupun *Green Accounting* dan *Environmental Disclosure* belum memberikan dampak signifikan secara individual, keduanya tetap berperan sebagai simbol komitmen perusahaan terhadap isu keberlanjutan yang, secara kolektif, mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dengan demikian, hasil uji F menegaskan bahwa Implementasi *Green Accounting*, *Good Corporate Governance* yang diprosikan melalui Kepemilikan Institusional, dan *Environmental Disclosure* secara simultan memiliki peran penting dalam memengaruhi pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Temuan ini menekankan bahwa keberlanjutan perusahaan memerlukan pendekatan yang terintegrasi, tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan secara seimbang.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa secara parsial Implementasi *Green Accounting* dan *Environmental Disclosure* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang menunjukkan bahwa penerapan akuntansi lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan yang dilakukan perusahaan belum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap SDGs, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional, maka pencapaian SDGs cenderung menurun. Namun demikian, secara simultan Implementasi *Green Accounting*, Kepemilikan Institusional, dan *Environmental Disclosure* terbukti berpengaruh signifikan terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hasil ini menunjukkan bahwa pencapaian SDGs pada perusahaan pertambangan dipengaruhi oleh



kombinasi aspek tata kelola perusahaan, praktik akuntansi lingkungan, dan pengungkapan lingkungan secara bersama-sama, meskipun kemampuan ketiga variabel tersebut dalam menjelaskan SDGs masih terbatas, yaitu sebesar 24,6%, sedangkan sisanya 75,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achim, M. V., Văidean, V. L., Sabau (Popa), A. I., & Safta, I. L. (2023). The Impact of the Quality of Corporate Governance on Sustainable Development: An Analysis Based on Development Level. *Sustainability*, 15(4), 3015. <https://doi.org/10.3390/su15043015>
- Arum, L. S. (2023). *Pengaruh Green Accounting , Environmental Performance , Material Flow Cost Accounting ( Mfca ) Dan Environmental Disclosure Terhadap Sustainable Development Goals ( Sdgs )*. 31(2), 54–67.
- Badjuri, A., Jaeni, & Kartika, A. (2021). Peran Corporate Social Responsibility Sebagai Pemoderasi Dalam Memprediksi Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Di Indonesia: Kajian Teori Legitimasi. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 28(1), 1–19. <https://www.unisbank.ac.id/ojs>
- Bebbington, J., & Unerman, J. (2018). Achieving the United Nations Sustainable Development Goals: an enabling role for accounting research. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2017-2929>
- Dosinta, N. F., Kurniasih, E. P., & Kartika, M. (2024). Implikasi Sustainable Development Goals di Indonesia: Perspektif Riset Akuntansi dan Ekonomi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 14(1), 103–111. <https://doi.org/10.37859/jae.v14i1.6248>
- Endiana, I., Dicriyani, N. L. G. M., Adiyadnya, M. S. P., & Putra, I. P. M. J. S. (2020). The effect of green accounting on corporate sustainability and financial performance. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12), 731–738. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no12.731>
- Ghozali, I. (2020). *25 Grand Theory, 25 Teori Stakeholder dan Ligitimasi*. [Publisher unknown].
- Haninun, H., Lindrianasari, L., & Denziana, A. (2018). The effect of environmental performance and disclosure on financial performance. *International Journal of Trade and Global Markets*, 11(1–2), 138–148.
- Hindriani, R., Siregar, D. K., Idayu, R., & Husni, M. (2024). Penerapan Green Accounting Dan Material Flow Cost Accounting Terhadap Sustainable Development. *Jurnal Revenue*, 4(2). <https://doi.org/10.46306/rev.v4i2>
- Ivana, A., & Novianti, W. (2022). The Effect Of Good Corporate Governance, Return On Assets (ROA), And Debt Ratio (DER) On Company Value In The Banking Sub-Sector Listed On The IDX For The 2016 – 2020 Period. *Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 2(2), 165–171. <https://doi.org/10.34010/jemba.v2i2.8532>
- Juliani, S., Yuniarti, R., Riswandi, P., Bengkulu, U. M., Bengkulu, U. M., & Bengkulu, U. M. (2023). *Nilai Perusahaan Dengan Corporate*. 01(01), 30–34.
- Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, (ESDM). (2023). *Laporan Kinerja ESDM Tahun 2022*. Kementerian ESDM RI.
- Lako, A. (2018). *Akuntansi Hijau: Isu, Teori, dan Aplikasi*. Salemba Empat.
- Loen, M. (2018). Penerapan Green Accounting dan Material Flow Cost Accounting (Mfca) terhadap Sustainable Development. *Jurnal Akuntansi & Bisnis Krisnadwipayana*,



- 5(1), 1–14.
- Maharani, D. E., & Prastiwi, A. (2024). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) Disclosure*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Meirawati, E., Soediro, A., & Az Zahra, N. I. (2023). The Moderating Effect of Sustainability Report on the Relationship between Capital Structure, Firm Size, Financial Performance, and Good Corporate Governance on Firm Value. *Akuntabilitas*, 17(1), 17–34. <https://doi.org/10.29259/ja.v17i1.19539>
- Mulyani, S., Kusmuriyanto, & Suryarini, T. (2017). Analisis Determinan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2, 54–64. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/RAK/article/view/500>
- Mumtazah, F., & Purwanto, A. (2020). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Pengungkapan Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2), 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Nabila, R., & Arinta, Y. N. (2021). Green Accounting for Sustainable Development: Case Study of Indonesia's Manufacturing Sector. *Akuntansi Dewantara*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.26460/ad.v5i1.9147>
- Nations, U. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.
- Nurrahman, A., & Sudarno. (2023). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Instiusional, dan Kepemilikan Asing terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(1). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Otoritas Jasa Keuangan, (OJK). (2017). *Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Otoritas Jasa Keuangan, (OJK). (2024). *Laporan Kinerja OJK Tahun 2023: Penguatan Sektor Jasa Keuangan dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PPN/Bappenas, K. (2023). *Bappenas will outline SDG achievements at 2023 SDG annual conference*. <https://bappenas.go.id/en/berita/bappenas-segera-jabarkan-capaian-tpbsdgs-di-sdgs-annual-conference-2023-yibl6>
- Putri, N. M. D., Animah, A., & Astuti, W. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(4), 968. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i04.p11>
- Rachmawati, W., & Karim, A. (2021). Pengaruh Green Accounting terhadap MFCA dalam Meningkatkan Keberlangsungan Usaha serta Resource Efficiency sebagai Variabel Moderating. *Tirtayasa Ekonomika*, 16(1), 59–75. <https://doi.org/10.35448/jte.v16i1.10205>
- Rahmawati, N. S. (2021). *Pengaruh Environmental Performance, Environmental Disclosure Dan Profitabilitas Terhadap Economic Performance*. 1–131.
- Ramadhani, R. W., & Prihantoro, E. (2020). Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(02), 117–129. <https://doi.org/10.46937/18202028913>



- Selipiyanti, S., & Fakhroni, Z. (2020). Pengaruh Implementasi Green Accounting dan Material Flow Cost Accounting Terhadap Sustainable Development. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(1), 109–116. <https://doi.org/10.17509/jaset.v12i1.23281>
- Setiadi, I., & Agustina, Y. (2020). Pengungkapan Lingkungan, Profitabilitas dan Nilai Perusahaan. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(2). <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v17i2.5807>
- Setiadi, I., & Sutadipraja, M. W. (2022). Pengungkapan Lingkungan, Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan dan Sustainable Development Goals (SDGS) di Indonesia. *LICOVBITECH, November*, 392–404.
- Somantri, A. J., & Sudrajat, A. M. (2023). Pengaruh Penerapan Green Accounting dan Kinerja Lingkungan terhadap Sustainable Development (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia 2020–2022). *Jurnal Akuntansi*, 15(2), 1–15.
- Supadi, Y. M., & Sudana, I. P. (2018). Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Sektor Pertambangan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4, 1165. <https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i04.p09>
- Tempo.co. (2023). *Kasus Pencemaran Lingkungan oleh Perusahaan Tambang di Indonesia*. <https://www.tempo.co>
- Wahyuningsih, W. (2018). Millenium Developoment Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Kesejahteraan Sosial. *Bisma*, 11(3), 390. <https://doi.org/10.19184/bisma.v11i3.6479>
- Walhi, W. L. H. I. (2022). *Catatan Akhir Tahun 2022: Potret Kerusakan Lingkungan di Indonesia*. Walhi.
- Wicaksono, A. P. N. (2023). Eksplorasi Sustainable Development Goals (SDGs) Disclosure di Indonesia. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(1), 125–156. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i1.26448>
- Widiastuti, H., Utami, E. R., & Handoko, R. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tipe Industri, Growth, Dan Media Exposure Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2015). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 107–117. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i2.6745>
- Widyaningsih, Y. E. (2020). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan. *Equilibrium Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 14(1), 20–30. <http://journal.ukrim.ac.id/index.php/jem/article/download/170/133>
- Zada, Q. A., & Sari, S. P. (2024). Tinjauan Tentang Firm Size, Environmental Performance Dan Voluntary Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan : Studi Kasus Pada Perusahaan Idx-Ic Sektor Energi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 1986–2006. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4274>